

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INSPEKTORAT DIY

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Bila Intervensi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	Data Kepegawaian PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	UU No 4 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbatas s.d. pelantikan	Dapat mengganggu proses penetapan kebijakan mutasi dan promosi	Menjaga agar lingkungan kerja kondusif
3	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j</li> <li>- Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</li> </ul>	Selama proses PBJ	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian
4	Hasil: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Reguler</li> <li>- Pemeriksaan Kasus</li> <li>- Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu</li> <li>- Reviu</li> <li>- Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</li> <li>- PP 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat (2)</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
5	Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</li> </ul>	Tidak terbatas	Penyalahgunaan/ intervensi oleh pihak yang tidak berhak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari intervensi</li> <li>- Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia.</li> </ul>
6	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan

		APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH			
7	Laporan Keuangan SKPD. Pemda sebelum diaudit	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terbatas Sampai Laporan Keuangan selesai diaudit	Penyalahgunaan/ intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
8	Surat surat yang diaktagorikan bersifat rahasia	- Pergub DIY No 30 Tahun 2011	Tak terbatas	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia

Yogyakarta, Juni 2018

Sekretaris Inspektorat DIY

Selaku PPID Pembantu

Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc

NIP . 19710717 199603 1 004